KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721-B1

			FINAL/TIDAK FINAL			1721-01	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 0 1 3 0 4			H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	AN YANG DIPOTONG			•		
A.1 NPWP : 68 807 596 9 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RIANDY							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	1.090.000	1.090.000	0	5	54.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 0 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
	nsi Pemerintah :		7 2 2			TIMUD	
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit C	Organisasi :					_	
		0 6 dd 0 4 mm					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : RIANDY Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa do	kumen ini tela	ah ditandatangani secara	

BTL21UWY